

1. ADL & PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA INTERNASIONAL)
2. PERDAGANGAN BEBAS DAN DILINDUNGI

SKRIPSI

ANI SUSILOWATI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM MEREK INDONESIA DAN TRIPS DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS DUNIA



KK
Day. 5/99.
- bus
p.

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

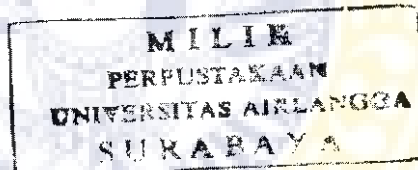
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS
MEREK TERKENAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM
MEREK INDONESIA DAN TRIPs DALAM MENGHADAPI
ERA PERDAGANGAN BEBAS DUNIA**

SKRIPSI

KK,
Pag. 5/99
sus.
p -

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PEMBIMBING

PENYUSUN

H.A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

NIP. 130.325.843

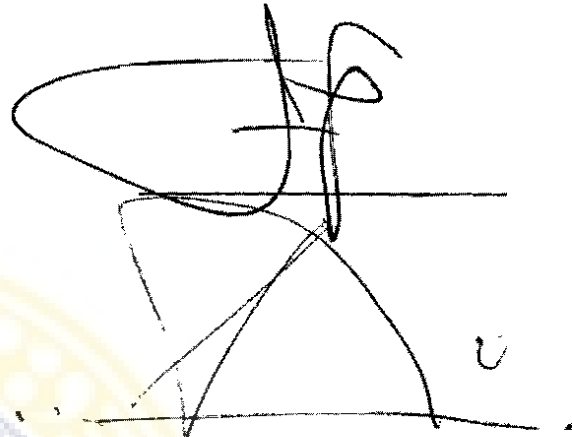
ANI SUSILOWATI

NIM. 039514125

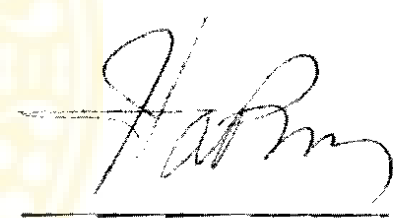
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

SKRIPSI ini telah diuji pada tanggal 14 Januari 1999
oleh Dosen Penguji :

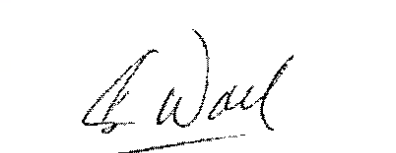
1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.



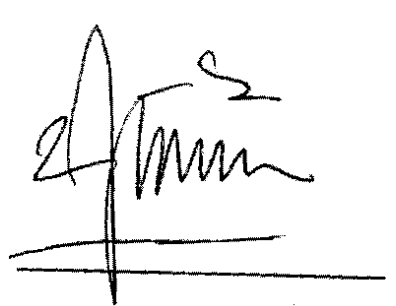
2. Anggota : 1. H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H. M.Hum.



3. Sri Woelan Azis, S.H.



4. Rahmi Jened, S.H, MH.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

1. Kategori merek terkenal menurut setiap subyektifitas dan obyektifitas para pihak, seperti kantor merek, pengadilan, pengacara, pakar HAKI akan berbeda-beda. Sedangkan dalam undang-undang merek Indonesia sudah diatur mengenai kategori suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Namun dalam setiap sengketa merek terkenal yang terjadi, hakim yang menangani kasus tersebut memberikan kategori merek terkenal berdasarkan inpretasinya sendiri. Sehingga antara satu jurisprudensi dengan jurisprudensi lain akan berbeda. Untuk dapat disebut sebagai merek dan didaftarkan maka unsur-unsur dalam merek tersebut yang berupa gambar, nama, kata, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut harus memiliki daya pembeda. Selain itu harus pula memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan substansi merek tersebut, yang diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 19 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No 14 tahun 1997 serta ketentuan dalam Konvensi Paris dan TRIPs. Sedangkan untuk dapat memperoleh kedudukan hukum sebagai pemegang hak atas merek yang sah berdasarkan undang-undang merek terbaru harus dilakukan pendaftaran terhadap merek tersebut. Pendaftaran ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pengajuan permintaan pendaftaran merek; tahap pengumuman, keberatan dan sanggahan; tahap pemeriksaan substansi dan tahap jangka waktu dan perpanjangan jangka

waktu merek terdaftar.

2. Dalam UU No 19 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No 14 tahun 1997 memberikan perlindungan terhadap hak atas merek terkenal khususnya pemilik hak atas merek terkenal dari luar negeri. Salah satu perlindungan itu berupa diberikannya hak prioritas (pasal 12 dan 13), yaitu hak istimewa yang diberikan kepada negara peserta Konvensi Paris tentang perlindungan HMI. Dengan hak ini warga negara peserta Konvensi Paris yang atau sedang mendaftarkan mereknya dapat sekaligus mendaftarkan mereknya di Indonesia. Untuk menghindari pemalsuan merek maka salah satu cara digunakan perjanjian lisensi, yaitu pihak pemilik hak atas merek memberikan ijin kepada seseorang, beberapa orang atau badan hukum untuk menggunakan mereknya. Ketentuan lisensi ini dalam undang-undang merek terbaru diatur dalam pasal 44 sampai dengan 50. Dan Peraturan Pemerintah mengenai lisensi yang masih berupa rancangan tersebut sampai sekarang belum diberlakukan. Apabila ada merek yang dilanggar maka pemilik hak atas merek yang memiliki merek dengan itikad baik dapat mengajukan gugatan pembatalan (pasal 50 sampai dengan pasal 60), gugatan atas pelanggaran merek (pasal 72 sampai dengan 76) dan tuntutan pidana.
3. Indonesia merupakan peserta dari perjanjian TRIPs sehingga Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs tersebut. Dalam perjanjian TRIPs tersebut pemilik dari merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif, yaitu hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak mempunyai persetujuan darinya, untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk

barang-barang atau jasa yang sama dengan milik pemilik hak atas merek yang sah. Dalam TRIPs ditentukan bahwa pendaftaran pertama dan juga pembaharuan tidak kurang dari tujuh tahun. Sedangkan dalam hal pengaturan mengenai lisensi merek menurut perjanjian TRIPs, setiap anggota dari perjanjian TRIPs dapat menentukan syarat-syarat yang berkenaan dengan lisensi dan peralihan dari merek dagang maupun jasa. Dan perjanjian lisensi secara paksa pada merek tidak diperbolehkan. Untuk melindungi pemilik hak atas merek yang sah terhadap pelanggaran hak atas mereknya maka perjanjian TRIPs mengatur mengenai upaya hukum dan prosedur administratif terhadap pelanggaran tersebut. Upaya hukum yang dilakukan dapat dalam upaya hukum perdata dengan meminta ganti rugi dan upaya hukum pidana yang berupa hukuman penjara atau denda bagi para pelanggar.

2. Saran.

1. Dari uraian skripsi ini dan dari apa yang dapat dilihat dalam praktek di masyarakat, maka diharapkan agar perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terkenal lebih terjamin. Hal tersebut menurut saya dapat terlaksana apabila ada usaha-usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan hukum merek yang berlaku secara benar. Agar lebih terlindungi lagi maka pemerintah RI harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang merek, misalnya PP mengenai Merek Terkenal atau PP mengenai Perjanjian Lisensi. Dalam hal peradilan merek, saya mempunyai pendapat

bahwa agar proses pemeriksaan sengketa-sengketa dibidang HMI tidak berlarut-larut maka saran saya agar dibentuk lembaga peradilan khusus masalah HMI. Sehingga proses peradilan akan lebih cepat dan pemilik hak atas merek terkenal yang sah tidak akan menanggung kerugian terhadap pelanggaran mereknya dalam waktu yang lama.

2. Apabila semua peraturan telah dibuat dan dijalankan secara baik oleh pemerintah, namun pada umumnya masyarakat industri kecil tidak mengetahui peraturan tersebut maka untuk melindungi pemilik hak atas merek terkenal akan sulit dilakukan. Dalam praktek masyarakat sering memalsukan merek terkenal dan pemerintah tidak menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia mendapat citra buruk di antara dunia dibidang HMI. Untuk menghindarkan hal-hal yang demikian pemerintah seharusnya lebih memasyarakatkan mengenai peraturan-peraturan dibidang HMI, misalnya memberikan penyuluhan pada kelompok masyarakat industri yang memproduksi barang-barang atau jasa. Dan pemerintah harus menindak semua pelanggaran terhadap hak atas merek dengan tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Demikianlah saran yang dapat saya berikan terhadap perlindungan hukum bagi hak atas merek terkenal di Indonesia yang selama ini diupayakan oleh pemerintah RI.